



Pemerintah Kota Jambi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015

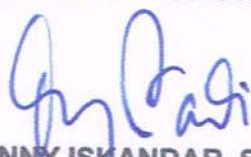
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Tahun 2016 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, Oktober 2015

KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI



DR. DONNY ISKANDAR, S.Sos, MT
NIP.19691125 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		3
1.1 Latar Belakang		3
1.2 Landasan Hukum		4
1.3 Maksud dan Tujuan		6
1.4 Sistematika Penulisan		6
BAB II EVALUASI KINEJA BAPPEDA TAHUN 2013		9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014		9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi		22
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda		25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD		25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda		30
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2016		31
BAB IV PENUTUP		41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 08)
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Jambi tahun 2009 Nomor 13)
11. Peraturan Daerah Jambi Nomor. 08 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

Tujuan sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang pedoman pada RKPD Kota Jambi

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Berisikan penjelasan mengenai program kegiatan pada Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI KINERJA BAPPEDA 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

Bappeda Kota Jambi pada tahun 2014 telah melaksanakan 7 (tujuh) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis

1. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

- a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat & Stakeholder tentang RTRW Kota Jambi 2013-2033.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- b. Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatnya Koordinasi Tim Penataan Ruang Daerah.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- c. Kegiatan Survey dan Pemetaan

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatnya Koordinasi Tim GIS Kota Jambi

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

2. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

- a. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya Informasi data base perencanaan, Jambi Dalam Angka

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

b. Kegiatan Pembuatan Website

Indikator Output kegiatan adalah : Adanya Website Bappeda Kota Jambi
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

3. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatnya Koordinasi Tim Percepatan Pembangunan Jambi Kota Seberang dan Tim RAD GRK
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

b. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perkotaan

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatnya koordinasi perencanaan infrastruktur perkotaan dan Tersedianya Dokumen RI-SPAM Kota Jambi
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

c. Kegiatan Koordinasi Bidang Sanitasi

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatnya Koordinasi Tim Sanitasi
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

4. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya informasi RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- b. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya Buku LKPJ dan Summary LKPJ Tahun 2013
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
Indikator Output kegiatan adalah : Laporan realisasi Fisik Pembangunan Daerah
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- d. Kegiatan Penyusunan Naskah dan Materi Pidato
Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya Pidato Walikota Jambi dalam berbagai Kegiatan
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- e. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Indikator Output kegiatan adalah : Dokumen Perencanaan Kota Jambi Tahun 2015
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- f. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Anggaran Pemerintah Daerah
Indikator Output kegiatan adalah : Kebijakan dan Rancangan Anggaran Pemerintah Daerah
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- g. Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatnya koordinasi Kelitbangan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- h. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Output kegiatan adalah : Informasi dan Komunikasi Perencanaan Daerah berbasis IT
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK Dekonsentrasi/TP
Indikator Output kegiatan adalah : Evaluasi dan Pengendalian DAK dan TP secara kontinue
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- j. Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA)
Indikator Output kegiatan adalah : Adanya informasi tentang sistem inovasi daerah
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
- k. Kegiatan Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan (Penelitian Mandiri)
Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatkan dan menciptakan peneliti-peneliti baru
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

5. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator Output kegiatan adalah : Data Identifikasi Produk-produk unggulan daerah

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Indikator Output kegiatan adalah : Data dan informasi tentang perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- c. Koordinasi Promosi Pertanian dan Ketahanan Pangan

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatnya koordinasi dan promosi Pertanian serta ketahanan pangan

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

6. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatkan Koordinasi Perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatkan Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya serta SDM

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

c. Kegiatan Koordinasi Program SAMISAKE

Indikator Output kegiatan adalah : Monitoring dan evaluasi SKPD Mitra
Sosbud dan SDM terkait SAMISAKE

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan
target kegiatan adalah sebesar 100 %

**7. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER
DAYA ALAM**

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Indikator Output kegiatan adalah : Meningkatkan Koordinasi
Perencanaan koordinasi perencanaan bidang Fispra

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan
target kegiatan adalah sebesar 100 %

Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)	Permasalahan
1	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG						
1	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	302.142.850	221.705.850	73,08	Terlaksananya sosialisasi Perda No 09 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi Tahun 2012-2033	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat & Stakeholder tentang RTRW Kota Jambi 2013-2033	
					Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Jambi 2014 - 2019	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Jambi 2014 - 2019	
2	Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	142.132.300	125.806.300	88,51	Terlaksananya koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Jambi	Meningkatnya Koordinasi Tim Penataan Ruang Daerah	
3	Kegiatan Survey dan Pemetaan	126.332.000	114.291.900	90,47	Tersedianya alat untuk foto udara, Koordinasi TIM GIS Kota Jambi,	Meningkatnya Koordinasi Tim GIS Kota Jambi	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI						
1	Kegiatan Penyusunan Profil Daerah	182.745.900	171.782.500	94,00	Tersusunnya Buku data base perencanaan, Buku Jambi Dalam Angka	Tersedianya Informasi data base perencanaan, Jambi Dalam Angka	
2	Kegiatan Pembuatan Website	32.325.000	28.682.750	88,73	Terlaksananya pembuatan website Bappeda Kota Jambi	Adanya Website Bappeda Kota Jambi	
3	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR						
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	246.360.300	191.903.140	77,90	Terbentuknya Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jambi Kota Seberang	Meningkatnya Koordinasi Tim Percepatan Pembangunan Jambi Kota Seberang dan Tim RAD GRK	

4	Kegiatan Penyusunan Naskah dan Materi Pidato	88.000.000	87.545.000	99,48	Tersedianya naskah pidato Walikota Jambi dan buku kumpulan naskah pidato Walikota Jambi Tahun 2013	Terlaksananya Walikota Jambi sebagai Kegiatan	Pidato dalam
5	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	122.929.100	119.869.100	97,51	Tersedianya dokumen perencanaan Tahunan Kota Jambi 2015	Dokumen Perencanaan Kota Jambi Tahun 2015	
6	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Anggaran Pemerintah Daerah	201.705.000	188.661.600	93,53	Tersedianya dokumen KUA-PPAS, RKA dan DPA	Kebijakan dan Rancangan Anggaran Pemerintah Daerah	
7	Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	109.760.000	107.143.220	97,62	Terlaksananya pertemuan dan rapat koordinasi kelitbangan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat.	Meningkatnya koordinasi Kelitbangan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat.	
8	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	260.000.000	250.138.700	96,21	Tersedianya aplikasi simreda dan buku petunjuk penggunaan aplikasi Simreda	Informasi dan Komunikasi Perencanaan Daerah berbasis IT	
9	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK Dekonsentrasi/TP	84.157.500	69.166.975	82,19	Tersedianya buku evaluasi dan pengendalian kegiatan DAK dan TP dan laporan DAK dan TP	Evaluasi dan Pengendalian DAK dan TP secara kontinue	
10	Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	105.480.000	101.883.810	96,59	Terbentuknya kelompok kerja sistem inovasi daerah (SIDa) dan terlaksananya inventarisasi kegiatan inovasi daerah	Adanya informasi tentang sistem inovasi daerah	
11	Kegiatan Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan (Penelitian Mandiri)	218.625.000	216.257.000	98,92	Terlaksananya pembinaan litbang melalui bantuan biaya penelitian sesuai dengan isu kajian yang dibutuhkan Pemerintah Kota Jambi.	Meningkatkan dan menciptakan peneliti-peneliti baru	
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI						

1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	122.787.100	116.883.140	95,19	Terlaksananya identifikasi produk unggulan Kota Jambi	Data Identifikasi Produk-produk unggulan daerah	
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	560.625.900	517.552.550	92,32	Terlaksananya pembangunan bidang ekonomi, TPID, Penyusunan Buku Indikator Ekonomi, Penyusunan buku pengembangan komoditi, produk dan jenis usaha kota, penyusunan buku profil peluang dan potensi (Buku Saku) dan leaflet, profil daerah dalam bentuk CD (Film pendek Kota).	Data dan informasi tentang perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
3	Koordinasi Promosi Pertanian dan Ketahanan Pangan	109.432.000	104.839.800	95,80	Terlaksananya Koordinasi Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya koordinasi dan promosi Pertanian serta ketahanan pangan	
6	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA						
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	196.610.000	175.393.350	89,21	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi	
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan SDM	317.925.000	299.801.800	94,30	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya serta SDM	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya serta SDM	
3	Kegiatan Koordinasi Program SAMISAKE	95.740.000	93.885.000	98,06	Terlaksananya money kegiatan pembangunan pada SKPD Mitra Bidang Sosbud dan SDM Kota Jambi.	Monitoring dan evaluasi SKPD Mitra Sosbud dan SDM terkait SAMISAKE	
7	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM						

1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	144.554.550	124119750	85,86	Terlaksananya perencanaan bidang Fispra , terlaksananya monitoring kegiatan dan peninjauan lapangan pembangunan bidang fispra dan tersedianya buku laporan koordinasi bidang fisik dan prasarana.	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan koordinasi perencanaan bidang Fispra
---	--	-------------	-----------	-------	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi

Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state).

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah";
2. Pasal 11, ayat (3): "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah";
3. Pasal 12, ayat (2): "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah";
4. Pasal 14, ayat (2): "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah".
5. Pasal 15, ayat (4): "Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD";
6. Pasal 16, ayat (4): "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah";

7. Pasal 18, ayat (2): "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah".
8. Pasal 20, ayat (2): "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah";
9. Pasal 21, ayat (4): "Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD";
10. Pasal 22, ayat (4): "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD";
11. Pasal 24, ayat (2): "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang";
12. Pasal 28, ayat (2): "Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD"; 13. Pasal 29, ayat (3): "Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD"

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor.19 Tahun 2009, Bappeda Kota Jambi didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Berikut ini Tabel 2.3 mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana StrategisSKPD dan Indikator Kinerja kunci :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAR-GET SPM	TAR-GET IKK	IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE PADA TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE (%)					PROYEKSI (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;			42	9	8	8	8	9	100	100	100			100	100	100	100	100
2	Tersedianya kajian dan Dokumen teknis			96	17	17	13	16	16	100	100	100			100	100	100	100	100
3	Terlaksananya koordinasi terhadap lembaga daerah dan pusat		65		65	65	65	65	65	100	100	100			100	100	100	100	100
4	Terlaksananya rakor, musyawarah, FGD dan lain-lain		320		50	60	65	70	75	100	100	100			100	100	100	100	100
5	Tersedianya 18 aplikasi sistem informasi			18	1	2	3	5	7	100	100	100			100	100	100	100	100

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kota Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kota Jambi. Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kota Jambi Tahun 2013-2018. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kota Jambi dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kota Jambi yang tidak terlepas dari Renstra Kota Jambi. Adapun strategi Bappeda Kota Jambi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah ;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Jambi Tahun 2016

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SKPD
1	Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong gorong 3. Pembangunan dan pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan 4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang 5. Pengendalian pemanfaatan ruang 6. Peningkatan kesiagaan dini dan	

		manajemen logistik kebencanaan 7. Peningkatan kualitas lingkungan berbasis kawasan 8. Peningkatan mutu dan perluasan kapasitas pelayanan perpustakaan 9. Peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan 10. Perencanaan tata ruang	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan 2. Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan 3. Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata 4. Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat 6. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan	
3	Percepatan dan perluasan pengembangan Ekonomi dan investasi	1. Pengembangan sentra sentra perdagangan dan industri 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 3. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 4. Peningkatan kemampuan teknologi industri 5. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani 6. Peningkatan kualitas kelembagaan petani 7. Peningkatan pelayanan pengelola perpasaran 8. Peningkatan produksi, mutu, produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	
4	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2. Pemanfaatan kecamatan dan kelurahan 3. Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat 4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkemas dan parpol 6. Pemeliharaan dan penyelenggaraan tramtibum, serta penegakkan regulasi daerah 7. Penataan peraturan Per Undang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah 8. Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah 9. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah 10. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah 11. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12. Peningkatan Kerjasama Daerah 13. Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan	

		Pelayanan Publik 14. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 15. Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD 16. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan 17. Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 18. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan 19. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 20. Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan 21. Pelayanan administrasi perkantoran 22. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23. Peningkatan disiplin aparatur 24. Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur 25. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26. Rancangan SKPD 27. Pengembangan Data dan Informasi	
5	Peningkatan Kualitas lingkungan Hidup	1. Peningkatan pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang publik dan keanekaragaman hayati 2. Peningkatan pengelolaan persampahan 3. Penurunan beban pencemaran	
6	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial	1. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 2. Koordinasi keagamaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS 5. Peningkatan kesetaraan gender dan perempuan dan perlindungan anak 6. Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Tabel 2.5
Keterkaitan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2016
Dengan Prioritas RKPD Kota Jambi

No	Kegiatan Bappeda	Prioritas Ranwal RKPD
1	Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi	Percepatan dan perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi
2	Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial;
3	Perencanaan, koordinasi dan survei perhubungan dan penataan ruang, pertanahan, SDH dan LH	Peningkatan Kualitas lingkungan hidup
4	Perencanaan, koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur pemukiman dan sanitasi kawasan perkotaan	Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
5	Penyusunan dan Koordinasi kajian kelitbangan dan sistem inovasi daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	
7	<i>Pengembangan Data/Informasi</i>	
8	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list ke working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses

perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Jambi yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kota Jambi, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dirumuskan dalam 4 misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas;

Tujuan:

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran:

Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Jambi

Misi 2 : Merumuskan Dokumen Perencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan;

Tujuan:

Meningkatkan keterlibatan peran seluruh *stakeholder* dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Sasaran:

Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

Misi 3 : Meningkatkan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Tujuan:

Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

Sasaran:

Menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah serta menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah;

Misi 4 : Mengembangkan informasi dan teknologi dalam proses perencanaan untuk meningkatkan kehandalan, akuntabilitas dan transparansi;

Tujuan:

Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka *optimalisasi perencanaan pembangunan daerah*;

Sasaran:

Menghasilkan aplikasi yang interaktif yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah;

3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2016

Pada Tahun 2016, Bappeda Kota Jambi akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data/Informasi

- Pengembangan Data dan Informasi

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Penyusunan dokumen Perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, JUA PPAS)
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah
- Penyusunan dan Koordinasi Kajian kelitbangan dan sistem inovasi daerah
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi

- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang sosbud dan Pemerintahan

3. Program Perencanaan Tata ruang

- Perencanaan koordiansi dan survei perhubungan dan penataan ruang, pertanahan SDA dan LH
- Perencanaan, Koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur pemukiman dan sanitasi kawasan perkotaan

Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2016, namun tidak masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakhti dan penjaga malam

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan peralatan perkantoran
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - Pengadaan Kartu/Mesin Absensi
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6. Program Perencanaan SKPD**
 - Penyusunan Rencana Kerja SKPD

**3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017
Bappeda Kota Jambi**

PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran							
1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan teradministrasinya serta terkirimnya surat keluar	Bappeda Kota Jambi	2000 surat	6,930,000	APBD		2000 surat	6,930,000
2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Bappeda Kota Jambi	100 %	187,000,000	APBD		100 %	187,000,000
3 Kegiatan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan dan barang/jasa yang tertib dan baik	Bappeda Kota Jambi	100 %	193.848.000	APBD		100 %	193.848.000
4 Kegiatan Jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	Bappeda Kota Jambi	100 %	110,000,000	APBD		100 %	110.000.000

5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bappeda Kota Jambi	100 %	60.076.500	APBD		100 %	60.076.500
6	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Administrasi Kantor	Bappeda Kota Jambi	100 %	55.000.000	APBD		100 %	55.000.000
7	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Jambi	100 %	70.000.000	APBD		100 %	70.000.000
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar, koran nasional, koran internasional, dan majalah	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	22.000.000	APBD		1 Tahun	22.000.000
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	Bappeda Kota Jambi	100 %	93.500.000	APBD		100 %	93.500.000
10	Perjalanan Dinas	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas	Bappeda Kota Jambi	100 %	780.000.000	APBD		100 %	780.000.000
11	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	Terlaksananya jasa pengemudi/sopir dan pramubhakti	Bappeda Kota Jambi	14 Org	184.800.000	APBD		14 Org	184.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Kinerja Aparatur							

1	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gudang Arsip Kantor (lanjutan)	Bappeda Kota Jambi	1 Unit	200,000,000	APBD		1 Unit	-
2	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasana aparatur	Bappeda Kota Jambi	100 %	14,000,000	APBD		100 %	114,000,000
3	Kegiatan Pengadaan mebeler	Tersedianya mebeler kantor	Bappeda Kota Jambi	1 Paket	6,000,000	APBD		1 Paket	6,000,000
4	Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran	Terlaksananya pengadaan penunjang kerja	Bappeda Kota Jambi	75 %	153,500,000	APBD		85 %	288,500,000
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan taman kantor	Bappeda Kota Jambi	100 %	62,000,000	APBD		100 %	162,000,000
6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan STNK Kendaraan dinas yang dipakai	Bappeda Kota Jambi	8 Mobil dan 16 Motor	245,320,000	APBD		8 Mobil dan 16 Motor	245,320,000
7	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya peralatan kantor kantor	Bappeda Kota Jambi	100 %	130,788,000	APBD		100 %	130,788,000
8	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehap kantor Bappeda Kota Jambi dan Taman Kantor Bappeda Kota Jambi	Bappeda Kota Jambi	100 %	175,000,000	APBD		100 %	175,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal							

1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tercapainya peningkatan disiplin setiap pegawai kantor Bappeda Kota Jambi	Bappeda Kota Jambi	100 %	35,000,000	APBD		100 %	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Pegawai (PDH dan PSR)	Bappeda Kota Jambi	62 stel dan 7 Stel	38,700,000	APBD		62 stel dan 7 Stel	38,700,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas							
1	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai yang diutus mengikuti bimtek	Bappeda Kota Jambi	43 Pegawai	40,000,000	APBD		43 Pegawai	45,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya kesesuaian laporan capaian kinerja dan keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku Laporan Tahunan, Lakip dan Tapkin bappeda Kota Jambi	Bappeda Kota Jambi	3 Dokumen	7,312,000	APBD		3 Dokumen	7,312,000
Program Perencanaan SKPD		Meningkatnya kesesuaian rencana kerja SKPD							
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Buku Renja dan Tapkin Bappeda 2016	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen	14,905,000	APBD		2 dokumen	15,000,000
Program Pengembangan Data/Informasi		Meningkatnya efektivitas perencanaan yang baik							

1	Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Pembangunan	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen dan 1 Sistem	162,342,500	APBD	-	2 dokumen	192,342,500
		Tersedianya aplikasi sistem informasi		1 apls				1 apls	
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Meningkatnya kesesuaian antara pemanfaatan dan rencana ruang		100%					
1	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Perhubungan dan Penataan Ruang, Pertanahan, SDA dan LH	Terlaksananya Rakor/FGD/Konsultasi Publik/Bidang Perhubungan dan Penataan ruang	Bappeda Kota Jambi	12 kali	290,000,000	APBD		12 kali	271,800,000
		Tersusunnya Kajian/dokumen penataan ruang		3 dok				1 dok	
		Tersedianya aplikasi sistem informasi		0				1 apls	
2	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Rakor/FGD/Konsultasi Publik/Bidang Infrastruktur pemukiman dan kawasan	Bappeda Kota Jambi	12 kali	271,800,000	APBD		12 kali	290,000,000
		Tersusunnya Kajian/dokumen Infrastruktur pemukiman dan kawasan		1 dok				1 dok	

	Tersedianya aplikasi sistem informasi	0				0	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya keserasian antara perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan						
	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	2 kali	1,295,115,000			2 kali	1,295,115,000
	Terlaksananya Musyawarah						
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dok				8 dok	
	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan, evaluasi pengendalian, dokumen LKPJ Tahun 2015 dan Summary, Kumpulan Pidato dan Naskah HUT Kota Jambi	6 dok	284,900,000	APBD		2 dok	284,900,000
	Terlaksananya rakor/konsultasi publik	4 kali				4 kali	
	Tersusunnya Laporan DAK	4 dok				4 dok	
	Tersedianya aplikasi sistem informasi	0				0	
5	Terlaksananya Rakor/FGD/Konsultasi Publik Bidang Kelitbangan	12 kali	553,600,000	APBD		12 kali	553,600,000
	Penyusunan dan kordinasi kajian kelitbangan dan sistem inovasi daerah						

	Tersusunnya Kajian/dokumen Perencanaan Bidang Kelitbangan		4 dok	809,375,000	APBD		4 dok	
6	Perencanaan, Kordinasi dan suvervisi pembangunan bidang ekonomi	Laporan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kota Jambi,	4 Laporan Koordinasii	809,375,000	APBD		13 kali	809,375,00
	Tersusunnya Kajian/dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		4 dok				3 dok	
	Tersedianya aplikasi sistem informasi		0				0	
7	Perencanaan, kordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan	Terlaksananya Rakor/FGD/Konsultasi Publik/Bidang Sosbud dan pemerintahan	14 kali	804,100,000	APBD		14 kali	804,100,000
	Tersusunnya Kajian/dokumen Perencanaan Bidang Sosbud dan Pemerintahan		2 dok				4 dok	
	Tersedianya aplikasi sistem informasi		1 apls				1 apls	

BAB IV PENUTUP

ISI KATTA

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018, berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2013-2018, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi. Target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja Perencanaan Daerah dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Daerah.

Indikator Kinerja perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Jambi, yang ditandai dengan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menghasilkan pengkajian dan dokumen perencanaan teknis yang handal yang ditandai dengan Tersedianya kajian dan Dokumen teknis untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pembangunan dan pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
3. Menghasilkan aplikasi yang interaktif yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah dengan menyusun aplikasi berbasis IT dalam mendukung pengelolaan perencanaan yang lebih efisien.